

## Resahkan Masyarakat, Satpol PP Tertibkan PKL di Tangsel

**TANGSEL (IM)**- Keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Setu Muara, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan (Tangsel) sudah membuat masyarakat sekitar resah. Atas dasar itu, Satpol PP Kota Tangerang Selatan melakukan penertiban dan akan menindak tegas dengan membongkar lapak jika para PKL masih membandel.

Kepala Seksi Ketertaman dan Keterbiban (Trantip) Satpol PP Kecamatan Pamulang, Kota Tangsel, Saptono Sri Nugroho mengatakan, pihaknya menerima banyak laporan dari masyarakat tentang keberadaan PKL di Setu Muara 7, Pamulang yang mengganggu ketertiban dan ketertaman.

Keluhannya yang disampaikan yakni, suara dari musik yang begitu keras dan juga jam operasional yang mengganggu aktivitas masyarakat. “Makanya tadi saya bertemu dengan koordinaturnya PKL, untuk menertibkan tempat ini. Poin yang saya sampaikan, musik jangan sampai lewat jam 12 malam, kedua jangan sampai ada miras yang diedarkan di wilayah ini. Dan intinya, bagaimana para PKL itu bisa tertanam nyaman untuk warga dan masyarakat Kota Tangsel,” katanya, Rabu (11/10).

Untuk itu, lanjutnya, kedatangan Satpol PP bersama TNI/Polri yakni untuk menemui paguyuban PKL tersebut. Dari hasil pertemuan tersebut diketahui bahwa di dalam paguyuban ini terdaftar 20 pedagang. Namun ada juga pedagang lain yang tidak terbagung paguyuban pedagang.

“Nanti kita bikin jadwal lagi untuk menyisir warung-warung yang ada di seluruh Setu Muara 7. Semua akan kita tindak jika melanggar,” ungkapnya. Dalam pertemuan dengan paguyuban PKL tersebut, pihaknya menyampaikan seluruh keluhan dari masyarakat. Di mana, para para pedagang berjanji tidak melakukan aktivitas yang dianggap Meresahkan tersebut kembali. “Jadi tadi saya bilang kepada koordinator kalau scandainya melanggar aturan itu bagaimana, bongkar pak kata koordinator. Ayo saja yang penting koordinator harus ada saat membongkar, biar ikut bertanggung jawab,” pungkaskannya. ● pp

## 200 Personel Satpol PP Amankan Perayaan HUT Ke-391 Tangerang

**TANGERANG (IM)**- Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Tangerang, Banten mengerahkan 200 personel untuk pengamanan di beberapa lokasi acara hari ulang tahun (HUT) ke-391 Kabupaten Tangerang yang jatuh pada Jumat (13/10).

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tangerang, Agus Suryana di Tangerang, Rabu (11/10), mengatakan bahwa pengurangan personel pengamanan itu untuk menyesuaikan dan kelancaran acara hari jadi daerah itu.

“Dari 200 personel yang dikerahkan, kami tempatkan di beberapa lokasi yang bergabung bersama unsur TNI-Polri demi menjaga keamanan dan kelancaran selama pelaksanaan,” katanya.

Ia menyebutkan dari ratusan personel pengamanan tersebut, nantinya ditempatkan di setiap lokasi yang ada di lingkup Pusat Pemerintahan Kabupaten Tangerang.

Selain itu, pihaknya juga akan melakukan patroli di sekitar lokasi utama serta akses pintu masuk dan keluar di acara tersebut.

“Titik pengamanan yang kami lakukan fokus pada lokasi utama acara dan beberapa arena yang berada di lokasi utama seperti arena bermain hingga lokasi panggung,” ucapnya.

Ia menambahkan selain melakukan pengamanan, pihaknya akan melakukan sterilisasi pedagang asongan yang berada di lokasi panggung acara. Menurut Agus, para pedagang asongan dilarang berjualan di lokasi utama atau alun-alun.

“Kami bukan melarang pedagang asongan untuk berjualan di lokasi, yang diperbolehkan berjualan di dalam Alun-alun hanya stan-stan yang sudah ditentukan oleh pihak panitia,” tuturnya.

Dia mengimbau kepada pedagang asongan yang berjualan di lokasi dalam alun-alun untuk berjualan di tempat yang sudah ditetapkan oleh petugas, yaitu di luar Alun-alun Tigaraksa.

“Saya harap masyarakat Kabupaten Tangerang yang menghadiri pergelaran ini turut menjaga ketertaman dan keterbiban, demi suksesnya acara HUT Kabupaten Tangerang,” ujarnya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Tangerang, Moch Maesyal Rasyid menambahkan bahwa HUT Kabupaten Tangerang merupakan milik seluruh warga Kabupaten Tangerang. Oleh karena itu, masyarakat harus menjaga dan turut memeriahkan acara tersebut.

“Mari kita meriahkan bersama-sama acara HUT ke-391 Kabupaten Tangerang,” kata dia. ● pp



IDN/ANTARA

## PENGUATAN JARINGAN INTERNET DI PASAR ANDIR BANDUNG

Pedagang melakukan siaran langsung untuk berjualan di Pasar Andir Trade Center, Bandung, Jawa Barat, Rabu (11/10). Pengelola Pasar Andir Trade Center Bandung, PT Aman Prima Jaya (APJ) melakukan penguatan fasilitas jaringan internet guna dimanfaatkan para pedagang yang mulai sepi dikunjungi sehingga bisa bersaing di era digital dalam memanfaatkan lokapasar (marketplace) serta media sosial sekaligus berencana menyediakan ruang khusus live shopping bagi para pedagang.

# Banyak Truk Langgar Jam Operasional, Pemkab Tangerang Bakal Gelar Razia

Berdasarkan hasil laporan dan evaluasi yang dilakukan, maka diperlukan operasi gabungan dengan aparat penegak hukum seperti TNI/Polri serta Satpol PP Kabupaten Tangerang. Hal itu untuk menekan aktivitas truk tanah di luar jam operasional, kata Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Tangerang, Achmad Taufik.

**TANGERANG (IM)**- Keberadaan truk tanah di Kabupaten Tangerang yang melanggar jam operasional sudah sangat meresahkan masyarakat.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Tangerang akan melakukan operasi gabu-

ngan antara Dinshub, Satpol PP, Polisdil, dan TNI untuk melakukan penertiban truk tanah dan penegakan Perbup No 12 Tahun 2022.

Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Tangerang, Achmad Taufik mengatakan, bahwa pihaknya akan mening-

katkan operasi gabungan terkait penertiban truk tanah yang melanggar jam operasional yang tertuang dalam Perbup Nomo 12 Tahun 2022.

“Kami sampaikan bahwa pada prinsipnya kita akan meningkatkan penertiban-penertiban. Khususnya pelaksanaan Perbup nomor 12 tahun 2022 ini,” katanya, Rabu (11/10).

Ia mengungkapkan berdasarkan hasil laporan dan evaluasi yang dilakukan. Maka diperlukan operasi gabungan dengan aparat penegak hukum seperti TNI/Polri serta Satpol PP Kabupaten Tangerang. Hal itu diperlukan untuk menekan aktivitas truk tanah diluar jam operasional.

“Nanti kita buat tim gabungan dari TNI/Polri sama Satpol PP. Dan hari ini sedang kami susun untuk pelaksanaan pen-

ertiban itu,” katanya.

Ia mengungkapkan, selama ini Dishub Kabupaten Tangerang sudah rutin memberikan imbauan kepada operator truk untuk menaati aturan yang tertuang dalam peraturan daerah (Perda) nomor 12 tahun 2022, yang berlaku demi keselamatan dan kelancaran lalu lintas di jalan raya.

Dia juga mengaku, jika aktivitas truk tanah pada jam-jam tertentu tidak dapat dihindari dan dicegah oleh pihaknya. Karena petugas di lapangan jumlahnya sangat terbatas. Sementara, jumlah titik yang dilalui oleh truk tanah cukup banyak.

“Jadi memang kalau truk yang lalu lintas di siang hari kita stop. Namun demikian kami pun menyadari apa bila ada satu atau dua truk yang

lolos, terpaksa mereka harus jalan lagi,” ungkapnya.

Maka dari itu, pihaknya saat ini melakukan upaya penindakan dengan menambah personel dan membentuk tim gabungan. Sehingga, efektivitas dari penindakan itu bisa berjalan dengan tepat.

Sementara itu, untuk targetnya adalah melakukan penegakan sesuai aturan yang ada, yakni mengenai aturan waktu operasional kendaraan truk tanah, pasir, dan sejenisnya dengan berat 8,5 ton harus beroperasi pada pukul 22.00-05.00 WIB.

“Nanti kita akan kawal sesuai aturan jam operasional yang ada. Dan jika nanti pas penertiban ditemukan pelanggaran lalu lintas akan ditindak oleh pihak kepolisian,” pungkaskannya. ● pra

## DPKP Kabupaten Tangerang Gelar Vaksin Rabies Gratis

**TANGERANG (IM)**- Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Kabupaten Tangerang menggelar vaksinasi rabies gratis dalam rangka memperingati World Rabies Day dan HUT ke 391 Kabupaten Tangerang di halaman Gedung Usaha Daerah (GUD) Pusat Pemerintah Kabupaten Tangerang.

Kepala DPKP Kabupaten Tangerang, Asep Jatnika Sutrisno, mengatakan kegiatan ini merupakan upaya mencegah serta mengantisipasi penyebaran virus rabies pada hewan peliharaan. Virus rabies merupakan penyakit menular yang dapat menyebabkan kematian.

“Untuk kegiatan ini kami sudah menyiapkan 500 dosis vaksin rabies untuk 500 ekor hewan peliharaan yang berpotensi menularkan rabies seperti kucing, anjing, musang, dan monyet,” katanya, Rabu (11/10).

Diketahui, saat ini populasi Hewan Penular Rabies (HPR) di Kabupaten Tangerang Tahun 2023 tercatat sebanyak 3.203 ekor yang terdiri dari 974 ekor anjing dan kucing 2.229 ekor.

Asep mengimbau kepada masyarakat yang memiliki hewan peliharaannya untuk dapat memanfaatkan momen tersebut dengan memberikan vaksin rabies pada hewan peliharaan mereka.

Sementara itu, pelaksanaan vaksinasi rabies akan dilakukan di dua tempat lainnya, yakni di Desa Salemban Jaya Kecamatan Kosambi pada 14 Oktober 2023 dan Rencananya di Perumahan Citra Raya Kecamatan Cikupa pada 15 Oktober 2023 (tentative). Untuk setiap harinya bisa didapatkan di UPTD Puskesmas Balaraja.

Pada kegiatan ini para warga juga terlihat antusias

membawa peliharaan mereka untuk divaksin. Salah satunya, Fahim, warga asal Kecamatan Binong.

Fahim menuturkan dirinya mengetahui informasi pelaksanaan vaksinasi rabies gratis tersebut melalui Puskesmas panongan saat ia tengah melakukan steril pada kedua kucing peliharaannya.

“Saat mendapat informasi kalau ada vaksin rabies gratis disini, kami langsung datang. Karena vaksin rabies ini penting ya, kita selalu berinteraksi dan bersinggungan langsung dengan kucing, jadi untuk menjaga kesehatan kami berikan vaksin,” pungkaskannya.

Ia berharap kegiatan vaksinasi rabies gratis ini dapat dilaksanakan secara rutin kedepannya, sehingga dapat mencegah terjangkitnya virus rabies pada hewan peliharaan lainnya. ● pp

## Status Darurat Kekeringan di Kab. Serang Bakal Dihentikan

**SERANG (IM)**- Status darurat kekeringan di Kabupaten Serang akan dicabut. Hal tersebut dikarenakan kondisi cuaca di wilayah Kabupaten Serang yang saat ini sudah mulai turun hujan.

Diketahui, status darurat kekeringan di Kabupaten Serang sudah diterapkan selama dua minggu yakni per tanggal 10 September hingga 2 Oktober 2023. Berdasarkan data dari BPBD Kabupaten Serang, terdapat setidaknya 102 desa di 22 kecamatan yang mengalami kekeringan.

Pejabat (Pj) Sekda Kabupaten Serang, Nanang Supriatna mengatakan, ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan Pemkab Serang tidak memperpanjang status darurat kekeringan.

Salah satu hal yang paling mendasar ialah kondisi cuaca di sebagian wilayah sudah mulai turun hujan meskipun intensitasnya tidak tinggi.

“Tidak diperpanjang, namun distribusi air tetap berjalan apabila ada yang memohon bantuan permintan air bersih. Prediksi dari BMKG, di November sudah normal lagi artinya hujan mulai turun merata, mudah-mudahan tidak meleset,” katanya Rabu (11/10).

Selain itu, menurutnya permohonan air bersih yang masuk ke BPBD Kabupaten Serang juga menjadi salah satu pertimbangan alam dicabutnya status darurat kekeringan. “Kemudian, permintaan permohonan bantuan dari kecamatan terdampak kekeringan sudah berkurang, tidak seperti sebelumnya banyak kecamatan melayangkan permohonan bantuan,” jelasnya.

Selama pelaksanaan penanganan darurat kekeringan, Pemkab Serang men-

ganggarkan penggunaan Dana Tidak Terduga (DIT) sebesar Rp500 juta. Namun penggunaannya hanya menghabiskan Rp200 juta. Untuk anggaran yang tersisa nantinya akan digunakan apabila terjadi bencana di Kabupaten Serang.

“Penggunaan DIT sudah dihentikan, dan nanti sisanya untuk antisipasi apabila masih ada yang membutuhkan bantuan maupun untuk bencana lainnya. Karena, memasuki musim penghujan kemungkinan banjir dan tanah longsor khawatir ada,” ujarnya.

Ia mengatakan, selama penanganan, pihaknya bukan hanya mendistribusikan air bersih saja, melainkan juga membuat sumur bor di 10 titik kekeringan terparah yang didanai oleh DIT tersebut.

“Bukan hanya dari Pemkab Serang saja, yang membangun sumur bor itu tapi ada dari BBWSC3 ikut membangun di dua titik. Jadi, selain bantuan air bersih kita juga ada pembangunan sumur, makanya bencana kekeringan bisa kita atasi,” ucapnya.

Meski status darurat kekeringan telah dicabut, lanjut Nanang, pihaknya akan tetap melakukan pendistribusian air bersih kepada masyarakat-masyarakat yang membutuhkan.

Sementara itu, Sekretaris BPBD Kabupaten Serang, Jajang Kusuma mengatakan, dalam upaya penanganan wilayah-wilayah yang masih terdampak kekeringan, pihaknya akan berkoordinasi dengan BPBD Provinsi Banten. Selain itu, pihaknya juga akan menggaet serta pihak-pihak yang konsen dalam penanganan kekeringan ke wilayah-wilayah yang masih terdampak. ● pra



IDN/ANTARA

## BALSAM PENYEMBUH LUKA KARYA MAHASISWA UGM

Mahasiswa UGM menunjukkan balsam penyembuh luka berbahan daun Asam Jawa (*Tamarindus indica*) yang diberi nama Tamarin Balm saat jumpa pers di kampus UGM, Sleman, D.I Yogyakarta, Rabu(11/10). Tamarin Balm karya lima mahasiswa UGM yaitu Muadz Fikri Gunawan, Khansa Auliya Putri Dewanto, Cokorda Keigoputra Pemayun, Abdi Cahyo Negoro, dan Fitriya Desy Nur Fajar yang berbahan herbal dan ampuh untuk mempercepat penyembuhan luka ini dijual ke pasaran dengan harga Rp12.000 perbuah.

IDN/ANTARA



## PENYALURAN BANTUAN PANGAN UNTUK WARGA

Warga menerima bantuan pangan berupa beras dari pemerintah di Kantor Kelurahan Trondol Kota Serang, Banten, Rabu (11/10). Pemda setempat bekerja sama dengan Perum Bulog akan menyalurkan 891,5 ton beras untuk 29.717 keluarga penerima manfaat.

## DPRD Prihatin Ribuan Masyarakat Banten Masih BAB di Kebon

**SERANG (IM)**- Anggota Komisi IV DPRD Banten, M Juheni mengaku prihatin dengan budaya masyarakat yang masih buang air besar (BAB) dan belum menerapkan pola hidup sehat.

“Ini prihatin kalau masih ada dolbon ya, ini PR yang luar biasa kalau itu masih ada,” katanya, Rabu (11/10). Ia menyebutkan selama ini belum pernah ada keluhan dari masyarakat tentang keluhan tidak memiliki jamban, terutama di Kota Serang yang menjadi daerah pilihannya. Menurutnya, penanganan permasalahan jamban pernah dilakukan pada tahun 2020 di Cipocok Jaya, Kota Serang. Setelah itu tidak ada lagi karena dianggap telah selesai.

“Kami sering terjun ke masyarakat, tapi nggak ada masalah dolbon, bener, di Kota Serang,” ungkapnya. Untuk itu, pihaknya meminta kepada masyarakat agar menyampaikan aspirasi tentang wilayah yang masih minim jamban. “Mohon masyarakat menyampaikan kepada kami wilayah mana masih dolbon itu ya, agar kita membuat program di Perkim untuk mengatasi permasalahan masyarakat,” terangnya. Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Banten, M. Nawa Said Dimiyati menekankan Pemprov Banten harus segera mengalokasikan anggaran untuk pembuatan jamban sebanyak-banyaknya di 2024. “Terus apa yang mereka (Pemprov) lakukan? Kalau saya bikin MCK sebanyak-banyaknya 2024. 23 tahun (Banten) 240 ribu masih dolbon,” tuturnya. ● pra